

DEMOKRASI NASIONAL

TUGAS

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



Dosen Pengampu Mata Kuliah: Ninik Sri Rahayu Wilujeng, S.H., M.H.

Disusun Oleh:

Nama : Achmad Rizaldi
NIM : 362258302084
Prodi : Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Kelas : 3A

JURUSAN BISNIS DAN INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI

TAHUN 2024/2025

Latar Belakang

Demokrasi, sebagai sistem pemerintahan yang mengutamakan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, telah lama diakui sebagai model ideal dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan kesejahteraan publik. Di Indonesia, demokrasi mendapatkan landasan yang kuat melalui Pancasila dan UUD 1945, yang menetapkan prinsip musyawarah dan mufakat sebagai pedoman dasar negara. Prinsip ini tak hanya memastikan keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memajukan hak asasi manusia dan keadilan sosial sebagai pilar dari demokrasi Pancasila (OSF, 2021).

Namun, perkembangan demokrasi di Indonesia juga tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik di masa lalu maupun saat ini. Dalam sejarahnya, Indonesia telah melalui berbagai bentuk pemerintahan yang kerap kali mengabaikan prinsip-prinsip demokratis, seperti pada era Orde Baru, di mana kebebasan berekspresi dan hak politik rakyat dibatasi (Universitas Pattimura). Tantangan ini memperlihatkan bahwa penerapan demokrasi di Indonesia tidak selalu berjalan seiring dengan nilai-nilai yang dianut dalam demokrasi universal, seperti kebebasan, keadilan, dan keterbukaan.

Di era reformasi, demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dengan berbagai perubahan institusional dan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat. Namun, kondisi ini pun tidak menjamin bahwa demokrasi Indonesia bebas dari hambatan. Berbagai kasus ketidakdemokrasian seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, dan rendahnya kualitas pendidikan politik di kalangan masyarakat menjadi tantangan yang perlu segera diatasi agar demokrasi di Indonesia benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat (Universitas Pendidikan Indonesia).

Secara keseluruhan, latar belakang historis dan konteks sosial-politik Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi di negara ini membutuhkan pembenahan yang berkelanjutan. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya demokrasi dalam konteks nasional, mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip demokrasi, serta menganalisis berbagai studi kasus yang menunjukkan pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang demokrasi nasional diharapkan dapat menjadi dasar untuk memperkuat sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis dan berkeadilan.

Studi Kasus: Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Ekspresi di Indonesia – Kasus Veronica Koman dan Kritik Terhadap Kebijakan Pemerintah

Kebebasan berpendapat adalah salah satu hak fundamental dalam sistem demokrasi yang ideal. Hak ini dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Meskipun jaminan konstitusional ini sangat jelas, dalam kenyataannya, praktik kebebasan berpendapat di Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai kendala dan ancaman, terutama ketika berhadapan dengan kritik terhadap pemerintah.

Latar Belakang Kasus Veronica Koman

Salah satu kasus yang menyoroti pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia adalah kasus Veronica Koman, seorang aktivis hak asasi manusia yang terkenal karena suaranya yang lantang dalam menyuarakan isu-isu hak-hak masyarakat Papua. Veronica, yang merupakan seorang pengacara HAM, sering kali berbicara mengenai perlakuan diskriminatif yang dialami masyarakat Papua di media sosial dan forum-forum internasional. Pada tahun 2019, Veronica menghadapi ancaman serius atas kebebasan berpendapatnya ketika ia mengungkapkan informasi dan dokumentasi mengenai aksi protes dan insiden kekerasan yang terjadi di Papua.

Dalam berbagai postingannya di media sosial, Veronica mengungkapkan insiden-insiden kekerasan yang dialami oleh masyarakat Papua dan ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok minoritas ini. Postingannya banyak menyita perhatian publik, baik di dalam maupun luar negeri, dan menimbulkan keprihatinan akan situasi hak asasi manusia di Papua.

Respon Pemerintah Terhadap Kritik

Pemerintah Indonesia merespons kritik Veronica dengan tindakan tegas. Ia didakwa dengan tuduhan menyebarkan informasi yang tidak benar atau provokatif, serta melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pihak kepolisian mengklaim bahwa informasi yang disebarkan oleh Veronica dapat mengganggu keamanan dan ketertiban publik. Sebagai konsekuensinya, Veronica dimasukkan dalam daftar buronan dan diancam dengan berbagai tuntutan hukum yang dapat membatasi kebebasan gerakannya sebagai seorang aktivis.

Langkah pemerintah ini memicu perdebatan luas mengenai batasan kebebasan berpendapat di Indonesia, terutama bagi aktivis yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. UU ITE, yang sejatinya dibuat untuk mengatur transaksi elektronik dan mencegah penyebaran berita bohong, sering kali disalahgunakan untuk membungkam suara kritis. Pasal-pasal dalam UU ITE

dianggap terlalu luas dan rentan digunakan untuk menjerat individu-individu yang berani mengungkapkan pendapat yang tidak sejalan dengan pandangan pemerintah.

Dampak Terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia

Kasus Veronica Koman menunjukkan ketegangan yang terjadi antara kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia dan langkah-langkah keamanan nasional yang diterapkan oleh pemerintah. Tindakan hukum terhadap Veronica mencerminkan bagaimana pemerintah kadang-kadang menggunakan kekuasaan mereka untuk membatasi kritik dan melindungi kepentingan mereka. Dalam konteks demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan pilar penting yang harus dilindungi karena hak ini memungkinkan warga negara untuk mengontrol dan memantau kebijakan pemerintah. Namun, ketakutan akan ancaman hukum membuat banyak warga ragu untuk menyuarakan pendapat mereka secara terbuka, yang akhirnya melemahkan peran masyarakat dalam sistem demokrasi.

Selain itu, kasus Veronica juga mengungkapkan betapa lemahnya perlindungan terhadap hak-hak aktivis yang mengadvokasi isu-isu yang sensitif di Indonesia. Banyak aktivis yang mengungkapkan kekhawatiran bahwa mereka dapat menghadapi tindakan serupa jika mereka terus vokal dalam menyuarakan isu-isu HAM atau masalah politik yang sensitif. Hal ini dapat menciptakan iklim ketakutan yang menghambat partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan sosial.

Sebagai tambahan, pemerintah juga menerapkan strategi lain dalam merespons kritik melalui pernyataan publik yang menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan nasional, terutama yang sensitif seperti Papua, harus dilakukan secara bertanggung jawab dan konstruktif. Beberapa pejabat menyatakan bahwa tindakan tegas terhadap Veronica Koman bertujuan untuk menjaga persatuan nasional dan mencegah provokasi yang dapat menimbulkan konflik sosial. Namun, banyak pihak menilai respons ini justru memperlihatkan kecenderungan untuk mengontrol narasi publik dan membatasi diskusi terbuka. Langkah ini, bagi banyak pengamat, menjadi contoh nyata bahwa kebijakan pemerintah dalam menangani kritik bisa menimbulkan efek pembungkaman terhadap isu-isu yang kontroversial, sehingga menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam demokrasi Indonesia.

Tanggapan Masyarakat dan Organisasi HAM Internasional

Kasus ini menarik perhatian luas dari berbagai organisasi HAM internasional, seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, yang menyatakan bahwa tindakan pemerintah Indonesia terhadap Veronica Koman merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Organisasi-organisasi ini mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan segala bentuk penindasan terhadap aktivis yang menyuarakan isu-isu HAM, terutama yang berkaitan dengan Papua. Menurut mereka, langkah-langkah ini justru menunjukkan kelemahan demokrasi di Indonesia dan mengarah pada praktik-praktik yang lebih otoriter.

Di sisi lain, masyarakat Indonesia terpecah dalam menyikapi kasus ini. Beberapa pihak mendukung tindakan pemerintah dengan alasan bahwa isu-isu seperti yang diangkat Veronica bisa menimbulkan instabilitas. Namun, ada pula banyak kalangan yang menganggap bahwa tindakan pemerintah tersebut tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat.

Kasus Veronica Koman ini juga memperlihatkan bagaimana tanggapan masyarakat Indonesia secara umum serta kelompok-kelompok masyarakat sipil dalam negeri, terutama komunitas aktivis dan lembaga-lembaga nirlaba yang aktif di bidang HAM. Di dalam negeri, organisasi-organisasi ini telah menyerukan pembatalan dakwaan terhadap Veronica dan meminta pemerintah untuk lebih transparan dan terbuka dalam menyelesaikan isu-isu terkait Papua. Berbagai organisasi non-pemerintah Indonesia menyatakan keprihatinannya terhadap penggunaan UU ITE sebagai alat represi terhadap aktivis, mengingat hal ini dapat menimbulkan preseden buruk dalam penegakan hukum yang seharusnya melindungi, bukan membatasi, kebebasan individu.

Berbagai kelompok masyarakat juga mengadakan aksi solidaritas dan petisi online untuk mendukung Veronica serta mendorong pemerintah agar menghapus pasal-pasal UU ITE yang dianggap sering disalahgunakan. Di media sosial, solidaritas masyarakat terlihat dalam bentuk kampanye tagar yang menyerukan perlindungan HAM bagi masyarakat Papua dan hak-hak para aktivis di Indonesia. Kampanye-kampanye ini berhasil menarik perhatian publik di tingkat nasional dan internasional, yang menunjukkan bahwa masih ada dukungan besar untuk perlindungan hak-hak sipil di Indonesia.

Efek Jangka Panjang Kasus Pembatasan Kebebasan Berpendapat

Kasus seperti yang dialami oleh Veronica Koman bukan hanya masalah hukum, tetapi juga menyangkut masa depan demokrasi dan hubungan pemerintah dengan masyarakat sipil. Pembatasan kebebasan berpendapat dapat memunculkan efek jangka panjang yang merugikan, seperti menurunnya tingkat partisipasi politik dan munculnya sikap apatis di kalangan masyarakat. Ketika masyarakat merasa takut atau ragu untuk menyuarakan kritik mereka terhadap pemerintah, fungsi kontrol dan partisipasi publik dalam pemerintahan menjadi lemah. Hal ini mengakibatkan munculnya potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang berwenang, karena kurangnya pengawasan dan kontrol dari masyarakat.

Efek jangka panjang lainnya adalah citra Indonesia di mata internasional. Sebagai negara yang kerap menyatakan komitmennya pada demokrasi dan hak asasi manusia, tindakan terhadap aktivis seperti Veronica bisa mencoreng reputasi Indonesia di arena global. Banyak negara dan organisasi internasional yang menilai bahwa tindakan ini menunjukkan ketidakkonsistenan Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya.

Selain itu, pengaruh ini merambah ke dalam proses pembentukan opini publik. Aktivis yang dituntut secara hukum sering kali menjadi simbol perjuangan bagi banyak orang yang merasa hak-haknya juga terancam. Kasus-kasus semacam ini bisa menciptakan solidaritas di antara kelompok masyarakat yang lebih luas dan mendorong perlawanan yang lebih kuat terhadap kebijakan yang dianggap represif. Maka, memperkuat perlindungan terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia tidak hanya penting untuk menghormati hak-hak individu, tetapi juga untuk memastikan stabilitas dan kedewasaan demokrasi dalam jangka panjang.

Lebih jauh, kasus-kasus seperti ini juga berpotensi memperburuk hubungan antara masyarakat sipil dan pemerintah, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan penegakan hukum. Ketidakpercayaan ini memicu keraguan dalam kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai isu sosial, ekonomi, maupun politik. Jika tidak segera diatasi, ketegangan ini dapat menimbulkan polarisasi yang makin mendalam dalam masyarakat, yang bisa menjadi tantangan besar bagi stabilitas nasional. Oleh karena itu, pendekatan pemerintah dalam menangani isu-isu sensitif, terutama yang menyangkut kebebasan sipil, seharusnya lebih bijak dan tidak represif. Langkah ini penting agar pemerintah dapat mempertahankan legitimasi dan dukungan masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi negara di masa mendatang.

Kesimpulan dan Implikasi

Kasus Veronica Koman menjadi contoh penting tentang bagaimana demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam melindungi hak-hak dasar warganya. Kebebasan berpendapat, yang seharusnya menjadi hak yang tidak dapat diganggu gugat dalam demokrasi, sering kali dikorbankan atas nama keamanan atau stabilitas nasional. Tindakan ini berdampak pada lemahnya demokrasi, yang semestinya menjamin kebebasan rakyat dalam mengungkapkan pandangan mereka.

Implikasi dari kasus ini sangat luas, termasuk terciptanya iklim ketakutan bagi aktivis dan masyarakat umum, yang dapat menurunkan partisipasi politik dan mendorong apatisme di kalangan warga negara. Untuk memperkuat demokrasi, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah nyata dalam melindungi kebebasan berpendapat, termasuk meninjau ulang undang-undang yang berpotensi membatasi hak tersebut dan memastikan bahwa tindakan hukum hanya diterapkan pada kasus yang memang terbukti melanggar hukum secara jelas, tanpa ada unsur pembungkaman politik.

Sumber Referensi:

"Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia," OSF.
<https://osf.io/984eb/download/?format=pdf>

"Tinjauan Sejarah Demokrasi di Indonesia," Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=9554&bid=8963>

"Perkembangan Demokrasi dan Tantangannya," Universitas Pendidikan Indonesia.
https://repository.upi.edu/17457/8/S_PSI_1002113_Chapter1.pdf

"UU yang Mengatur Kebebasan Berpendapat," Kompas.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/04/01000091/uu-yang-mengatur-kebebasan-berpendapat>.

"Kasus Veronica Koman dan Kebebasan Berpendapat," Tempo.
<https://www.tempo.co/abc/4663/status-tersangka-veronica-koman-perburuk-kebebasan-berpendapat-di-indonesia>

"Kronologi Kasus Veronica Koman Hingga Masuk Daftar Buron," CNN Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190920125617-12-432232/kronologi-kasus-veronica-koman-hingga-masuk-daftar-buron>

"Keluarga Veronica Koman dikirim peledak dan bangkai ayam: Teror atas aktivis HAM Papua yang terus berulang," BBC Indonesia.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59212175>

"Aktivis Desak Polisi Ungkap Pelaku Teror di Kediaman Keluarga Aktivis Pro-Papua Veronica Koman," BenarNews.
<https://www.benarnews.org/indonesian/berita/kediaman-veronica-koman-diteror-11082021131741.html>

"Pasal Karet UU ITE : Sejoli Pembungkam Kritik," Tempo.
<https://interaktif.tempo.co/proyek/pasal-karet-uu-ite-sejoli-pembungkam-kritik/index.php>

"Meredam Suara Membungkam Kritik," Amnesty International Indonesia.
https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2022/10/ASA2160132022_FINAL_TERGERUSNYA-KEBEBASAN-SIPIL-DI-INDONESIA-3.pdf